

**MANAJEMEN BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA SEMARANG**

Radit Bekti Nugroho, Mochamad Mustam, Dyah Lituhayu

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Disaster in indonesia, it is not a stranger because it must be managed well so there is a risk that may reduce. This study focused on the readiness of disaster management in regional disaster management agencies semarang city, hether in accordance with the theory of disaster management is pre stage of the disaster , disaster occurs , and after the disaster. And the purpose of this research is want to describe the management of disasters in the disaster on BPBD Semarang city also aware of the barriers faced in disaster management.

A method of research in wearing that is descriptive qualitative with conduct an interview to the speakers who have been in chose last time to get result is in want. The results obtained through interviews with a focus on three stages is pre disaster , when disaster , and after the disaster that BPBD Semarang city did not have the procedure remains at handling the disaster and monitoring.

Hence BPBD Semarang must immediately realize the procedure remains handling the disasters and their supervision, So that when tackling the disaster can walk with effective and efficient, for coordination must be in the fix that go well and the realization of BPBD ready to cope with the disasters in the city of Semarang

Keywords : Disaster, Disaster Management, BPBD

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, dan dulunya sebagian Kota Semarang merupakan wilayah laut dengan semakin majunya zaman dan kebutuhan akan lahan maka dibentuklah wilayah baru dengan menguruk daerah pantai dan laut menjadi daratan dan berakibat rawan bencana banjir seperti sekarang juga dengan bencana tanah longsor dan tanah bergerak.

Bencana tanah longsor dan tanah bergerak ini di sebabkan oleh karakteristik geografis kota Semarang sendiri karena terbagi dua wilayah yaitu wilayah atas dan wilayah bawah, wilayah atas yang merupakan bukit sangat rawan akan bencana tanah longsor apalagi saat musim penghujan datang, wilayah bawah kota Semarang pun rawan bencana yaitu banjir, banjir di kota Semarang terbagi menjadi 2 karakter yaitu banjir rob yang disebabkan permukaan air laut yang naik sampai ke daratan dan banjir kiriman yang datang dari daerah atas.

Pengelolaan bencana di Kota Semarang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal contohnya saja pada hal koordinasi sudah sepakat dengan instansi lain untuk datang ke lokasi bencana tetapi tidak datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan manajemen bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dan mengetahui hambatan-hambatan dalam proses manajemen bencana di BPBD Kota Semarang.

1.3 Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana, pengertian dari manajemen bencana sendiri adalah suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan (Soehatman Ramli, 2010: 31). Pertama ada tahap pra bencana yang terdiri dari kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini, yang kedua ada saat

bencana/tanggap darurat, dan yang ketiga yaitu pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. METODE

2.1 Tipe Penelitian

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini,

2.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian tentang pengelolaan manajemen bencana dan lokus penelitian ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang .

2.3 Subjek Penelitiannya

1. Sekretaris BPBD
2. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
4. Kepala Seksi Kedaruratan
5. Kepala Seksi Rehabilitasi
6. Kepala Seksi Rekonstruksi

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan cara pengumpulan informasi atau data diantaranya:

- a. Studi kepustakaan

- b. Observasi
- c. Wawancara.
- d. Dokumentasi

2.5 Teknik Analisis Data

- a. Reduksi data
- b. Menyajikan data
- c. Menarik kesimpulan

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN MANAJEMEN BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI BPBD KOTA SEMARANG

3.1 Manajemen Bencana

Manajemen Bencana di BPBD Kota Semarang terdiri dari 3 tahapan Yaitu Pra bencana, Saat Bencana, dan Pasca bencana.

Manajemen Pra bencana sudah berjalan dengan baik karena dalam kesiapsiagaan sudah mempunyai sarana dan parasarana yang memadai begitu juga dengan mitigasi sudah berjalan tetapi masih ada kendala dalam perencanaan penanggulangan bencana dengan istilah lain yaitu rencana kontingensi, di BPBD Kota Semarang belum mempunyai rencana kontigensi yang seharusnya punya

karena sudah tercantum pada tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Semarang tepatnya pada Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan juga Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Kesiapsiagaan, menurut Gillespie dan Streeter (1987) dalam (Bevaola Kusumasari, 2014: 24) adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana.

Menurut WHO (World Health Organization) dalam (Jack Pinckowski, 2007: 17) perencanaan penanggulangan bencana yang baik adalah perencanaan yang memiliki empat elemen perencanaan, yaitu rencana kesiapan, rencana kontingensi, rencana operasi kedaruratan, dan rencana pemulihan, menurut teori diatas seharusnya dalam setiap tahapan manajemen bencana harus ada perencanaannya pada fenomena yang terjadi di BPBD kota Semarang bukan hanya rencana kontingensi saja tetapi seluruh perencanaan dalam tahapan manajemen bencana belum

mempunyai perencanaan yang tetap yang seharusnya minimal ada satu saja perencanaan untuk memudahkan penanggulangan bencana. Jadi dalam bagian perencanaan ini BPBD Kota Semarang belum baik karena belum mempunyai perencanaan yang tetap untuk menanggulangi bencana. Berikut adalah kegiatan yang dijalankan BPBD selagi rencana kontingensi belum ada.

Begitu juga dengan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. BPBD Kota Semarang sudah baik dalam mengelola sumber daya manusia terlihat diadakannya pelatihan menanggulangi bencana setiap bulannya bagi pegawai BPBD dan sarana dan prasarana yang BPBD BPBD punya cukup memadai untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana.

Kemudian mitigasi, Mitigasi sering juga disebut pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana (Federal Emergency Management Agency/ FEMA, 2006).

Sudah jelas bahwa mitigasi adalah upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi dan

upaya yang dilakukan BPBD adalah memberikan sosialisasi tentang daerah yang rawan bencana dan membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Upaya yang dilakukan ini merupakan mitigasi non struktural, Mitigasi non struktural menurut (Coppola, 2007) dalam (Bevaola Kusumasari, 2014: 23) adalah pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Teknik ini dianggap sebagai cara 'manusia menyesuaikan diri dengan alam.

Kelurahan Siaga Bencana (KSB) sendiri sudah di bentuk di 8 kelurahan yaitu Bandarharjo, Lempongsari, Kemijen, Kaligawe, Sukorejo, Jomblang, Wonosari, dan Muktiharjo lor. Itulah kelurahan yang dibentuk KSB sesuai dengan karakteristik dari bencana di setiap kelurahan. Jadi jika bencana banjir diberi pelatihan menggunakan perahu karet dan menyelamatkan barang berharga dan lain-lain, kemudian jika tanah longsor beserta pohon tumbang di beri pelatihan untuk memotong pohon tumbang memakai geragji

mesin dan jika terjadi kebakaran di ajari bagaimana memadamkan api secara sederhana. KSB dalam setahun dilakukan 4 kali di 4 kelurahan berbeda, dan KSB ini di beri fasilitas berupa baju seragam rescue beserta sepatunya juga sarana radio reg untuk berkomunikasi dengan posko BPBD Kota Semarang.

Peringatan dini menurut (Ramli, 2010: 32) adalah langkah yang dilakukan dengan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

Peringatan ini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki. Diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana.

Kemudian dari hasil wawancara bahwa untuk menyebarluaskan informasi tentang

bencana yang akan terjadi BPBD melalui Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dengan media yang di pakai radio reg dan handy talkie dan alurnya adalah BPBD mendapat informasi dari BMKG setempat kemudian di teruskan ke daerah yang rawan bencana melauai KSB nya dengan media radio reg kemudian diteruskan kepada masyarakat sekitar.

Manajemen saat bencana di BPBD kota Semarang pada umumnya sudah berjalan dengan baik dari penanggulangan saat bencana sampai dengan tugas dan fungsi antar bidang Di BPBD kota Semarang dan juga pada tahapan ini adalah tahapan yang paling krusial dalam manajemen bencana, oleh karena itu di perlukan langkah-langkah tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat di minimalkan. Fenomena yang di temukan saat wawancara dengan informan bahwa BPBD sudah mempunyai tim reaksi cepat dan tim kaji cepat, tim reaksi cepat adalah tim yang dibentuk untuk merespon dengan segera jika bencana terjadi dengan segera mendatangi tempat kejadian untuk

mengevakuasi korban bencana dengan segera kemudian tim kaji cepat datang setelah tim reaksi cepat yang bertugas untuk mengkaji/menilai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang terjadi.

Setelah seluruh kegiatan ini sudah di jalankan tetapi masih ada hambatan yaitu soal koordinasi bukan di dalam BPBD tetapi untuk diluar BPBD dengan singkat kata koordinasi dengan instansi terkait bencana seperti PSDA dan BINAMARGA Kota Semarang, informan mengatakan bahwa jika terjadi bencana instansi tersebut tidak datang ke tempat kejadian di telepon pun gak di angkat, padahal sudah di adakan rapat tiga bulan sekali, itu sangat menghambat tetapi selama ini berjalan dengan baik walaupun ada hambatan tentang koordinasi, ini tidak sesuai dengan teori yang dikatakan oleh (Perry, 2007) dalam (Bevaola Kusumasari, 2014: 28) yang mengatakan bahwa respons/daya tanggap mempunyai tujuan untuk koordinasi penilaian kebutuhan jika pihak yang di koordinasikan tidak datang ke tempat kejadian maka penilaian kebutuhan pun sulit untuk di capai contohnya saja jika

kita memerlukan eskavator atau truk pengangkut untuk bencana tanah longsor instansi yang mempunyai sarana tersebut yaitu PSDA tidak datang maka itu akan menghambat evakuasi korban tanah longsor.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 tahun 2008 tentang pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Dalam melakukan proses rehabilitasi, BPBD Kota Semarang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dengan memberikan bantuan sementara, jika banjir di berikan makanan siap saji dan sembako untuk tiga hari, kemudian jika tanah longsor sama seperti banjir yaitu makanan siap saji dan sembako juga membantu membuat talud sementara dari bambu dan terpal agar

mengurangi resiko jika bencana terjadi kembali, dan BPBD juga menerangkan untuk membantu pasar yang kebakaran mereka membuat lapak sementara untuk para pedagang agar bisa berjualan seperti semula, ini terjadi pada pasar kokrosono semarang yang mengalami kebakaran. Dan untuk rehabilitasi setelah penanganan darurat memeberikan bantuan berupa uang yang sesuai fasilitas yang di tentukan dalam Peraturan Walikota No. 5a tahun 2012 tentang program bantuan sosial berpola hibah kepada korban bencana, jadi anggaran ini memang di sediakan untuk korban bencana diluar dari anggaran yang di rencanakan. Dan perwal ini ada klasifikasinya untuk yang rumahnya hancur terbawa banjir atau habis terbakar maksimal bisa diberikan 10 juta rupiah dan yang sedang itu 5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Bantuan sosial ini tidak begitu saja diberikan harus melalui proses dengan mengajukan proposal kemudian tim dari BPBD meninjau lokasi dan membuat penilaian untuk memberikan bantuan jika di setuju walikota maka uang bisa diambil

dengan menunjukan pengantar dari walikota ke DPKAD kota Semarang waktu yang di butuhkan dalam proses ini kurang lebih 2 minggu, untuk kedepanya berhubungan dengan waktu proses pemberian bantuan bisa dipercepat agar bisa di pergunakan masyarakat untuk memulihkan keadaan ekonominya kembali.

3.2 Pengawasan Bencana

Menurut Nickels, McHuge and Mc Huge (1997) mengatakan pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah di rencanakan di organisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan.

Kemudian tahapan proses pengawasan menurut Hani Handoko sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata

4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan

5. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. (Hani Handoko, 2011: 363)

Pada organisasi manapun pasti mempunyai pengawasan dan standar pengawasan masing-masing, tetapi di BPBD untuk standar pengawasan belum ada pengawasan secara baku tetapi standar secara umum sudah ada. Seharusnya standar pengawasan untuk mengukur kinerja organisasi maupun kegiatan dari penanggulangan bencana dari BPBD kota Semarang sendiri, jika tidak adanya standar pengawasan ini berakibat pada tidak efektif dan efisiennya kegiatan yang dilakukan BPBD. Untuk kedepannya segera di buat standar pengawasan yang baku agar kinerja organisasi lebih terkontrol dan terwujudnya visi dan misi BPBD sebagai tujuan akhir dari organisasi.

3.3 Hambatan dalam Manajemen Bencana

Hambatan yang dirasakan oleh BPBD dalam melakukan manajemen bencana tidaklah mudah dari dalam BPBD sendiri juga

dari masyarakat dan antara instansi pemerintah daerah seperti PSDA dan BINAMARGA.

Untuk masyarakat sendiri hambatan yang di hadapi oleh BPBD adalah karena ini merupakan pengetahuan baru bagi masyarakat dan sulit untuk mengubah sudut pandang tentang bencana, apalagi yang tinggal di daerah rawan bencana, karena sudah bertahun-tahun tinggal di daerah yang rawan bencana masyarakat menganggap sudah biasa bencana itu tetapi selalu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, oleh karena itu BPBD memberi sosialisasi tentang memperkecil resiko yang di timbulkan oleh bencana setelah beberapa kali mengadakan sosialisasi dan penyuluhan masyarakat tersadar bahwa sangat bermanfaat untuk memperkecil resiko bencana itu sangat perlu. Setelah masyarakat sadar akan resiko bencana yang ditimbulkan BPBD membuat Kelurahan Siaga Bencana untuk membentuk masyarakat untuk siaga bencana jika sudah dibentuk kemudian BPBD memperkuat KSB ini dengan memberi pelatihan sesuai dengan daerah rawan bencananya dan di beri radio reg

dan handy talkie supaya lebih mudah berkoordinasi dengan BPBD jika bencana yang dihadapi cukup besar dan memerlukan bantuan dari BPBD.

Untuk masalah koordinasi antar instansi pemerintah daerah, walaupun sudah sering mengadakan rapat tetapi terkadang jika ada bencana terjadi tidak muncul dilokasi dan di telpon pun tidak di jawab dan terkesan BPBD jalan sendiri padahal sarana dan prasarana yang di punyai BPBD tidak mencakup semua olrh karena itu di butuhkan instansi lain untuk saling melengkapi. Untuk membantu koordinasi ini dibuatlah FPRB (Forum Pengurangan Resiko Bencana) dan ini terdiri dari tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta dan gelar pasukan yang diikuti instansi pemerintah di kota Semarang yang terkait dengan bencana untuk melihat sarana dan parasarana yang di punyai oleh instansi di kota Semarang untuk menghadapi bencana dan ini biasanya dilaksanakan menjelang musim penghujan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Manajemen bencana di BPBD kota Semarang sudah cukup baik dengan bukti pada tahap pra bencana dengan kegiatan kesiapsiagaan, sarana dan prasarana yang dipunyai BPBD sudah memadai dan sumber daya yang di punyai manusia dan dan lainya cukup baik pada manajemen mitigasi sudah baik terbukti dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di kelurahan yang rawan bencana dan untuk peringatan dini sudah baik juga karena sudah bekerja sama dengan BMKG dan KSB yang di buat BPBD sudah di sediakan radio reg dan handy talkie untuk berhubungan denga posko BPBD jika terjadi bencana kekurangannya hanya tidak adanya rencana penanggulangan bencana/rencana kontingensi. Masuk Manajemen saat bencana BPBD sudah baik karena sudah koordinasi antar bidang Di BPBD sudah berjalan dengan baik dan kekurangannya adalah koordinasi antar instansi/SKPD terkait bencana yaitu

BINAMARGA DAN PSDA. Selanjutnya pasca bencana sudah cukup baik karena sudah ada bantuan yang di berikan kepada korban pada saat terjadi bencana dan setelah bencana yang kurang pada waktu pemberian bantuan yang seharusnya lebih cepat. Terakhir pengawasan yang kurang baik karena tidakpunya standar pengawasan yang baku.

Hambatan yang dihadapi dalam manajemen bencana di BPBD yaitu

1. Tidak adanya rencana kontingensi pada kegiatan kesiapsiagaan
2. Koordinasi yang kurang optimal dari BPBD dengan instansi terkait bencana.
3. Waktu pemberian bantuan yang cukup lama.
4. Belum adanya standar pengawasan yang baku untuk penanggu;angan bencana di BPBD.

4.2 Saran

Tahapan Pra Bencana

Segera merealisasikan rencana kontingensi agar mempermudah pada saat menanggulangi

bencana karena sudah mempunyai panduan untuk menanggulangi bencana.

Tahapan Saat Bencana

Dengan cara menambah intensitas pertemuan dan komunikasi agar jika terjadi bencana sewaktu-waktu bisa langsung ketempat kejadian sesuai dengan bantuan yang di butuhkan. Bila perlu membuat perjanjian hitam di atas putih/ perjanjian tertulis agar menjadi tanggung jawab instansi yang terkait dengan bencana seperti PSDA, BINA MARGA, DINAS KEBAKARAN.

Tahapan Pasca bencana

Tahapan pasca bencana yang perlu di tambah jika bisa proses waktu pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terkena bencana dipercepat karena dinilai cukup lama jika dua minggu setelah penyerahan proposal kepada BPBD.

Tahapan Pengawasan

Segera merealisasikan standar pengawasan yang baku agar dapat memantau kinerja pegawai untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hambatan dalam Manajemen Bencana

Untuk mengatasi hambatan perlu direalisasikan yang pertama rencana kontngensi, yang kedua untuk koordinasi segera di bentuk forum semacam wadah antara BPBD, instansi terkait dengan masyarakat agar koordinasi jadi lebih mudah.

5. Daftar Rujukan

Handoko, Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta : Gava Media .

Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Pinkowski, Jack. 2008. *Disaster Manajemen – Handbook* CRC. NewYork: Press Taylor and Francis Group

Ramli, Soehatman. 2010. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.

